

FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

NURHIDAYAT AKBAR
NIM. 10500107060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulis skripsi saudara Nurhidayat Akbar NIM: 10500107060, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I

Drs. Syaharuddin, M.Si.
NIP. 19600502 199102 1 001

Pembimbing II

Dr. Hamsir, SH, M.Hum.
NIP. 19610404 199303 1 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	7
D. Alasan Memilih Judul	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Tujuan Dan Kegunaan	14
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	15
 BAB II. PERKAWINAN	 17
A. Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukumnya	17
B. Perkawinan Di Bawah Umur	28
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan	30
 BAB III. PERKAWINAN DARI SEGI HUKUM ADAT	 36
A. Perkawinan Menurut Hukum Adat	36
B. Dampak Perkawinan Usia Dini	41
C. Pandangan Secara Biologis Dan Psikologis	47
 BAB IV. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	 53
A. Perkawinan Menurut Syari'at Islam	53
B. Perkawinan Menurut Peraturan Negara dan Hukum Islam	60
C. Asas Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan	64

BAB V. PENUTUP	79
Kesimpulan	79
Saran–Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Sebab perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral karena di dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri, namun kenyataannya membuktikan, bahwa untuk memelihara keharmonisan dan kelestarian bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bahkan dalam hal kasih sayang pun sulit untuk diwujudkan dikarenakan faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan perbedaan kecenderungan pandangan hidup tersebut.

Perkawinan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya, perkawinan mempunyai peranan dalam kehidupan. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.

Adapun perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materiil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya).²

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Karena manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT sehingga di dalam kebutuhan biologisnya di atur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan di antara lawan jenisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini di harapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsunya saja. Dan selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak di lahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tentang melaksanakan perkawinan S. An-Nuur, 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.³

Selain yang di sebutkan di atas, lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata, lebih jauh lagi perkawinan juga berfungsi bagi kemaslahatan ummat manusia.

Di samping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuha jasmani dan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga,

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: CV.ATLAS. 2000),h. 549.

kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur di kala susah dan lelah, pada hakekatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang menciptakan alam semesta.

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau bathin di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴

⁴Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung; Pustaka Setia, 1999), h. 12.

Olehnya itu dalam membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan. Yaitu menciptakan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah),

pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantungi (rahmah). Dengan demikian untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut seorang suami dan istri berhak memilih calon pasangannya masing-masing sebagaimana telah dijelaskan didalam KHI pasal 16 ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita menemukan fenomena-fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, mulai dari pernikahan di usia dini, kawin lari dan pernikahan di bawah tangan yang sering dipermasalahkan masyarakat kita sekarang, padahal dalam KHI menjelaskan :

Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Serta dalam ayat (2) dijelaskan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974.⁵

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan

mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.⁶

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga dalam pegangan hukum Islam, hubungan seks yang mendapatkan legitimasi agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

⁵Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: DIK, 1999), h.19.

⁶Yusuf Fatawie, "Pernikahan Dini," pernikahan dini dalam perspektif agama negara (2 April 2013)

Pada umumnya remaja yang menikah diusia dini tidak dapat menikmati bangku pendidikan. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja- remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks diluar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil diluar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan kepernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu : Bagaimana Perkawinan di Bawah Umur di tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimana Eksistensi perkawinan di bawah umur di tinjau dari hukum Islam dan hukum adat ?

C. Hipotesis

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, berupa jawaban sementara, yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut di atas yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu; karena dijodohkan oleh kedua orang tua, faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, dan karena faktor kemauan anak sendiri.
2. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya diperbolehkan setelah baligh antara kedua calon suami istri, dengan syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah telah mencapai usia baligh harus memiliki kemampuan fisik dan mental, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 (1) UU No. 1 tahun

1974, adalah konsep pemikiran hukum Islam tentang usia perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. ”Dan selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat (1) bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan didasarkan kepada pertimbangan kemasalahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Sedangkan perkawinan dibawa umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.

D. Definisi Operasionalnya

Untuk lebih memudahkan dimengerti makna judul yang dibahas oleh penulis, maka perlu dikemukakan lebih dahulu batasan mengenai pengertian judul tersebut yaitu :

“Perkawinan atau pernikahan“ yang dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dua kata, yaitu ‘nikah atau zawaj’ sedangkan arti kata nikah berarti bergabung dan juga berarti akad atau perjanjian. Jadi, “Perkawinan” menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah atau “Perkawinan” ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Sedangkan “Perkawinan” menurut hukum adat ialah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang

dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.⁸

“Di bawah umur” yang dimaksud yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang Pria dan seorang wanita di mana umur salah satunya masih di bawah umur batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap lahir maupun bathin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang kuat dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

⁷Amir syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta : Kencana Mas, 2000), h.73.

⁸Tholib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 222

“Hukum Islam” adalah peraturan yang dirumuskan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam.⁹

“Hukum Adat” adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam

bermasyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁰

Jadi, yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.

E. Kajian Pustaka

Yang di bahas dalam skripsi ini adalah “Perkawinan di Bawah Umur ditinjau Dari segi Hukum Islam dan Hukum Adat”. Setelah penulis membaca beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, maka penulis mengambil beberapa buku :

1. Drs. Ahmad Rofiq, M.A., dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia membahas tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum

⁹Mohammad Daud Ali, hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : PT,Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42.

¹⁰Tholib Setiady, op-cit, h.6

perkawinan dimana salah satu di dalam pembahasan dijelaskan bahwa pada umumnya langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode masalah mursalah. Penetapan konsep hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat ini dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihat Hukum Islam.

2. Beni Ahmad Saebani, dalam bukunya Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak lengkap jika hanya bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan itu berkaitan pula dengan Hukum suatu negara, perkawinan baru dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

3. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengandung arti Hukum Perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Buku ini berbicara tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan. Hukum perkawinan Islam itu menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa.

4. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah yang dialih bahasakan oleh Moh Thalib, menyatakan bahwa di dunia dewasa ini umur orang kawin rata-rata 24 tahun bagi perempuan dan para laki-laki 28 tahun. Umur tersebut menurutnya umur yang sangat relatif dan paling tengah-tengah.

5. H.Andi Syamsu Alam dalam bukunya Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan membahas tentang keluarga sakinah, merupakan suatu model atau performance keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang, baik yang telah melangsungkan perkawinan maupun yang belum. Salah satu ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia yang sudah matang. Sebab, usia yang sudah matang akan mempengaruhi kematangan psikhis seseorang. Meskipun tidak menentukan batas usia tertentu yang ideal untuk melangsungkan perkawinan, Islam sangat menekankan arti penting kematangan dan kedewasaan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang tidak pernah sunyi dari badai dan gelombang kehidupan. Suami istri yang telah matang, baik fisik maupun psikhis tentu akan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang menerpa kehidupan rumah tangga.

6. Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia membahas tentang dimana hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam pembangunan (hukum) karena: hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan, perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, dan pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis.

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan syari'at Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits.
- b. Yuridis, Yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan peraturan yang ada dan masih berlaku.

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu metode dengan membaca buku-buku atau tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengolahan data

Dalam rangka pengolahan data dan menganalisis data, penulis menggunakan beberapa bentuk-bentuk analisis yaitu ;

- a. Metode Induktif, yaitu cara mengolah dan menganalisis data dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu cara mengolah dan menganalisis data dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

- c. Metode Komparatif, yaitu suatu metode dengan menggunakan studi banding, antara satu data dengan data yang lainnya, kemudian berusaha mengambil kesimpulan.¹¹

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang diharapkan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan penulisan

Mengingat bahwa persoalan perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal, Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan

¹¹Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jilid.Cet.XXI, Yogyakarta : 1990),h.9

a. menjadi tidak sempurna, tetapi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan perkawinan di bawah umur. Maka sadar akan hal ini, penulis bermaksud memahami dan mengetahui realitas yang ada di masyarakat secara tepat dan teliti dalam kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Dengan penulisan skripsi ini, nantinya diharapkan penulis benar-benar memahami tentang perkawinan, salah satunya adalah masalah perkawinan di bawah umur dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas.
- b. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap masyarakat pada umumnya dan pada penulis khususnya.

H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan secara global uraian tiap-tiap bab kemudian menarik kesimpulan.

Skripsi ini diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, kemudian abstrak. Dan selanjutnya masuk pada bab pertama, dalam bab ini berisikan permasalahan, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan, yang terakhir adalah garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua, penulis mengemukakan pengertian perkawinan, pengertian keluarga, kemudian tujuan dari pada perkawinan, pandangan secara biologis pada masa dewasa, selanjutnya pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang perkawinan di bawah umur.

Bab ketiga, penulis menjelaskan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur, kemudian dampak perkawinan di bawah umur, selanjutnya solusi penyelesaian perkawinan di bawah umur.

Bab keempat, penulis menjelaskan dampak perkawinan dini ditinjau secara psikologis, pandangan secara biologis dan psikologis tentang masa dewasa, kemudian perkawinan menurut peraturan Negara dan hukum Islam.

Bab kelima, adalah bab penutup bab ini berisi kesimpulan sebagai penegasan dari hasil penelitian penulis, juga dicantumkan beberapa saran-saran penulis.



BAB II

PERKAWINAN

A. Pengertian perkawinan Dan Dasar Hukumnya

Perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral karena di dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami dan istri, namun kenyataannya membuktikan, bahwa untuk memelihara keharmonisan dan kelestarian bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bahkan dalam hal kasih sayang pun sulit untuk diwujudkan dikarenakan faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, dan perbedaan kecenderungan pandangan hidup. Pada dasarnya pergaulan suami istri merupakan persenyawaan jiwa raga dan cipta rasa, maka antara suami istri diwajibkan bergaul dengan sebaik-baiknya.

Pengertian perkawinan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa “Kawin atau Nikah” dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu “Nikah” dan “Zawaj”, Kata na-ka-ha terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin seperti pada S. An-Nisaa ayat 3 .

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Kemudian kata Za-wa-ja dalam Al-Qur'an dalam arti Kawin, seperti pada S. Al-Ahzab. 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا^ع
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahannya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah “. Sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu Apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid

¹Departemen agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta : CV. ATLAS , 2000), h. 115

telah mengahiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.²

Sedangkan di dalam hukum adat yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab

masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³

Adapun syarat syahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing sedang hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi.⁴

Rukun perkawinan tersebut antara lain ;

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya Wali dari pihak calon mempelai wanita
- b. Adanya dua orang saksi
- c. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- d. Mahar atau Mas kawin.⁵

²Ibid., h. 673 – 674.

³Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 221.

⁴Ahmad Ichsan, Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sesiologi Hukum, (Jakarta : Paradia Paramita, 1986), h. 31.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menghalalkan hubungan suami-istri.

Agar perkawinan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku, sedapat mungkin dipahami syarat syahnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut norma hukum yang termuat dalam pasal 6 UU. Nomor 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 1) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁵Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif Al-Qur'an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni, (Tangerang: Elsas, 2010), h. 30-31.

2) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

3) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶

Syarat persetujuan yang diatur Pasal 6 UU. Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan menghindari terjadinya kawin paksa guna mewujudkan kesukarelaan. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan, benar-benar didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan yang dimaksud, merupakan aplikasi dan implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian di dalam rumusan Pasal 7 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa :

⁶Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 4-5.

- 1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.

- 2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁷

Sebenarnya norma hukum tentang pembatasan usia perkawinan (pasal 7 UU. Nomor 1 tahun 1974) tidak berkaitan secara langsung dengan kedewasaan, tetapi berorientasi pada pemenuhan syarat administratif. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur melalui tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti yang bersangkutan sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁸

Bagi seorang pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dapat

⁷Ibid

⁸H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2003), h. 53-54.

melangsungkan perkawinan apabila memperoleh izin dari kedua orang tua. Namun apabila usia calon mempelai sudah melewati batas usia maksimal yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974, secara *ex officio* tidak memerlukan lagi izin kedua orang tua. Perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 UU. Nomor 1 Tahun 1974, berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang.

Betapa berat dan berbelit-belitnya persyaratan perkawinan dimaksud, menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan perkawinan di bawah umur mengakibatkan juga perkawinan di bawah umur dengan suatu harapan bahwa yang penting dapat tercapai tujuan perkawinan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Sedang menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang “sakinah, mawaddah dan warahmah”.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.⁹

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata kesenangan lahiriyah melainkan membentuk suatu lembaga, dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri, kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam, dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yakni pengabdian kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW.¹⁰

Betapa suci dan mulianya tujuan perkawinan tersebut, sehingga pemerintah sebagai Ulil Amri berupaya membuat regulasi mengatur tata cara dan prosudur perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974

⁹Tholib setiady, Op-cit, h. 222.

¹⁰Abdul Rahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Jakarta: Akademika, 1992), h. 8.

berikut berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak lengkap jika hanya bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan itu berkaitan pula dengan hukum dengan hukum suatu negara, perkawinan baru dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara serta memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Salah satu hikmah pekawinan adalah pasangan suami istri satu sama lain dapat saling menikmati hubungan seksual yang halal, dalam hubungan suami istri di samping hak masing-masing ada juga hak bersama yaitu ; (1) hak Tamattu' badani (menikmati hubungan sebadan dan segala kesenangan badani lainnya), (2) hak saling mewarisi, (3) hak nasab anak dan (4) hak saling menyenangkan dan membahagiakan. Di bawah ini penulis akan menguraikan apa yang di maksud dengan :

- 1) Hak Tamattu' Badani yaitu : Salah satu hikmah perkawinan adalah pasangan suami istri satu sama lain dapat saling menikmati hubungan seksual yang halal, bahkan berpahala, Islam memang mengakui bahwa setiap manusia normal membutuhkan penyaluran nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. Islam tidak memerangi nafsu tersebut tetapi juga tidak membiarkannya lepas tanpa kendali. Islam mengatur penyalurannya secara halal dan baik melalui ikatan perkawinan. Karena sifatnya hak bersama, tentu juga sekaligus menjadi kewajiban

bersama. Artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban suami kepada istri, tetapi juga merupakan kewajiban istri kepada suami. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini sebagaimana istri tidak boleh menolak keinginan suami.

2) Hak saling mewarisi yaitu : Hubungan saling mewarisi terjadi karena dua sebab, Pertama : karena hubungan darah, kedua : karena hubungan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan ini yang mendapat warisan hanyalah pasangan suami istri. Suami mewarisi istri dan istri mewarisi suami. Dalam surat An-Nisa' ayat 12 dijelaskan bahwa suami mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan bila istri tidak punya anak. Dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bila istri punya anak. Sebaliknya istri dapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bila suami tidak punya anak, dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bila suami punya anak. Hubungan saling mewarisi hanya berlaku dalam perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan sesama Muslim. Bila perkawinannya tidak sah, atau salah seorang tidak muslim baik dari awal atau di tengah-tengah perkawinan maka haknya batal.

3) Hak nasab anak yaitu : anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua, walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya anak di nisbahkan kepada bapaknya sehingga seorang anak disebut Fulan ibn fulan, atau Fulanah Bintu Fulan, bukan Fulan ibn Fulanah atau Fulanah Bintu Fulanah. Apapun yang terjadi kemudian (misalnya perceraian) status anak tetap anak berdua. Masing-masing tidak dapat mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, walaupun pengadilan dapat memilih dengan siapa anak ikut. Perlu juga di ingatkan di sini bahwa penisbahan seorang anak kepada bapaknya secara

formal tetap berlaku sekalipun bagi anak perempuan setelah menikah. Anak perempuan kalau sudah menikah tidak diajarkan oleh Islam untuk menisbahkan dirinya kepada suami sebagaimana yang menjadi tradisi sebagian masyarakat kita sekarang.¹¹

Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum dapat anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua yang hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya akhirnya menjadikan anak tidak lebih dari sebuah “pajangan” yang secara fisik dapat di banggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu, maupun amalnya. Anak selain sebagai perhiasan hidup dunia, anak juga menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Orang tua di uji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak-anak dapat melalaikan ibadah kepada Allah SWT, atau apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik; mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang shaleh.

¹¹H.Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Jakarta Pusat : Pustaka Pelajar Offset, Cet. IV. 2001), h. 163.

B. Perkawinan Di Bawah Umur

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur banyak terjadi disebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya maka akan terjadi perkawinan di bawah umur dan merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat atau melakukan tindakan yang melanggar adat seperti : kawin silariang (gadis dan pemuda bersepakat untuk melarikan diri bersama-sama setelah itu melakukan perkawinan), kawin nilariang (perkawinan yang terjadi setelah laki-laki melarikan seorang perempuan), kawin erangkale (perkawinan yang dilaksanakan setelah gadis membawa dirinya sendiri kepada laki-laki).

Pelanggaran adat yang sangat mengganggu keseimbangan masyarakat sehingga perkawinan di bawah umur dianggap suatu jalan terbaik walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (Psikologis). Kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur bukan hanya merupakan kisah lama yang terjadi, peninggalan masa lalu yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi, walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda.

Perkawinan di bawah umur biasanya dilaksanakan karena salah satu atau kedua mempelai belum cukup umur (usia minimal yang di syartkan), yakni calon mempelai pria belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun. Di samping itu, calon mempelai biasanya dari kalangan petani dan memang tidak ada niat atau maksud menjadi Pegawai Negeri Sipil yang memerlukan buku atau akta nikah. Sehingga kedudukan buku nikah atau akta nikah sebagai alat bukti otentik telah terjadinya perkawinan tidak terlalu diperlukan, tetapi yang terpenting perkawinannya di hadiri oleh penghulu adat dan

di akui keabsahan perkawinannya oleh adat.

Ada sebagian masyarakat mensiasati perkawinan di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur. Alasan orang tua yang tidak meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan ijin oleh Aparat Desa tidak akan menerima atau menolak terjadinya perkawinan di bawah umur. Disamping itu pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 oleh pihak yang berwenang sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan bukanlah termasuk perkawinan di bawah umur, akan tetapi merupakan perkawinan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Karena memang Islam menentukan secara pasti batasan usia perkawinan seperti yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Dan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan anaknya hanya cukup maksimal tingkat Sekolah Dasar (SD). Jika di teliti ada dua penyebab, yaitu pertama : karena orang tua kurang mampu dalam ekonomi, dan yang kedua yaitu : karena orang tua ingin menimang cucu dan ada perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku dan perawan tua. Dan kebanyakan perkawinan di bawah umur dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan

pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada laki-laki.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Sebagaimana yang telah dijelaskan lebih dahulu mengenai perkawinan di bawah umur, maka selanjutnya dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu : Faktor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor adat dan budaya, faktor Ekonomi, faktor Agama, dan yang terakhir adalah karena rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Faktor perkawinan atas kehendak orang tua, karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari

pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.

Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai kepelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perjodohan itu mengambil jalan dengan menyumpahi anaknya dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.

Menurut Ahmad Rafiq menjelaskan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa

dan raganya.¹²

Berdasarkan hal ini, Pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita.

- Kemauan anak sendiri.

Perkawinan di bawah umur menurut pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 UU. Nomor 1 tahun 1974, berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang. Betapa berat dan berbelit-belitnya persyaratan perkawinan dimaksud, menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan perkawinan di bawah umur mengakibatkan juga perkawinan di bawah umur dengan suatu harapan bahwa yang penting dapat tercapai tujuan perkawinan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974),

¹²Ahmad Ropi, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu, ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh

atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antara kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Perkawinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW, juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Hal inilah menunjukkan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap yang mengaku sebagai ummat Nabi Muhammad SAW.¹³ Berdasarkan penjelasan diatas, baik dalam pasal-pasal perundang-undangan maupun dalam Al-Qur'an serta dalam hadist, penulis

menarik kesimpulan bahwa pernikahan dini tidak ditentukan dalam ayat atau hadist secara tekstual mencegahnya, akan tetapi dari pendapat para ahli fikih menghubungkan permasalahan ini dengan S. An-Nisa

¹³Andi Syamsu Alam,Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Jakarta;Kencana Mas,1990), h. 3

ayat 4 yang didalamnya ada isyarat pada pernikahan dini. Sedangkan para ulama fikih menyusun KHI membatasi usia perkawinan yang penting bagi kemaslahatan umat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkawinan adalah

merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia terutama dalam pergaulan hidup masyarakat, Perkawinan adalah merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

-Faktor Adat dan Budaya, di bawah umur sudah banyak kita lihat terjadi dimasyarakat sebab orang tua merasa malu jika anaknya terlambat mendapat jodoh dia khawatir anaknya dianggap gadis tua atau tidak laku, apabila sudah baligh. Dan betugi pula sebaliknya, orang tua merasa bangga bila anaknya cepat mendapatkan jodoh .

- Faktor Ekonomi, merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika di kaitkan dengan praktek perkawinan di bawah umur, penulis mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk menikahkan anaknya, Tujuan orang tua segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.

- Faktor Agama, merupakan salah satu penyebab perkawinan di bawah umur, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut.

BAB III

PERKAWINAN DARI SEGI HUKUM ADAT

A. Perkawinan Menurut hukum Adat

Yang dimaksud dengan perkawinan di dalam hukum adat adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum Adat perkawinan tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu. Bahkan hukum Adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak tersebut masih berusia kanak-kanak yang biasa disebut kawin gantung. Hal ini dapat terjadi karena didalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak tetapi juga merupakan persatuan dua keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua belah pihak itu akan tetap mendapatkan bimbingan oleh keluarganya.

Hukum Adat adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam

bermasyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (Sanksi).¹

“Perkawinan” menurut Hukum Adat ialah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara Adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.² “Perkawinan atau Pernikahan “ yang dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah atau Ziwayj sedangkan arti nikah berarti bergabung dan juga berarti akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah atau “Perkawinan “ ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Oleh karena itu dalam membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan. Yaitu menciptakan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua tercapai suatu kehidupan yang aman tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyayangi (warahmah), dengan demikian untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut seorang suami dan istri berhak memilih calon pasangannya masing-masing

¹Tholib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung ; Albeta, 2009), h. 6.

²Talib Setiady, ibid – h. 222.

³Amir Syarifuddin, Garis-Garis besar Fiqh (Jakarta; kencana Mas, 2003), h. 73.

sebagaimana telah dijelaskan di dalam KHL pasal 16 ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan fenomena-fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, mulai dari pernikahan di usia dini, kawin lari dan pernikahan di bawah tangan yang sering dipermasalahkan masyarakat kita sekarang.

Menurut norma hukum yang termuat dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa

- 1 . Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2 . Untk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3 . Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud dalam ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4 . Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarganya yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5 . Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6 . Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴

Masalah perkawinan di bawah umur menurut hukum Adat di mana calon mempelai pria umurnya kurang dari 19 tahun dan calon mempelai wanita umurnya kurang dari 16 tahun, Mereka ini dipersatukan oleh kedua orang tua mereka dengan simbol melaksanakan perkawinan dengan kata lain hidup kedua mempelai ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan atau yang di sebut kawin gantung. Dalam artian kedua pasangan ini belum dapat bercampur sebagaimana layaknya suami istri, Setelah kedua pasangan tersebut mencapai usia yang telah ditentukan maka perempuan tersebut baligh barulah diadakan pernikahan secara sah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, Perkawinan Adat dianggap sah apabila dihadiri oleh Pemangku Adat, sedang kehadiran Pemangku Adat tersebut, tidaklah berkedudukan sebagai saksi akad nikah (saksi nikah). Oleh karena yang dimaksud saksi nikah menurut kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari dua orang, biasanya diambil dari wakil mempelai laki-laki dan wakil dari mempelai

⁴Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, (Jakarta : Visimedia, 2007), h. 4

wanita. Memang ada pemahaman dikalangan sebahagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan menurut adat mereka masing-masing.

Untuk mensiasati perkawinan mereka yang belum cukup umur dengan kata lain perkawinan di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur. Alasan orang tua yang tidak meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan ijin oleh aparat pemerintah atau menolak terjadinya perkawinan di bawah umur.

Namun yang menjadi tolak ukur masyarakat dipedesaan untuk mengetahui kedewasaan seorang anak adalah dari segi fisiknya. Di samping itu, pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batal usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1997 oleh pihak yang berwewenang sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan bukanlah termasuk perkawinan di bawah umur, akan tetapi merupakan perkawinan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam, karena memang Islam menentukan secara pasti batas usia perkawinan seperti yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan anaknya maksimal cukup sampai sekolah dasar (SD). Jika diteliti ada dua penyebab,

yaitu pertama karena orang tua kurang mampu dalam ekonomi, dan yang kedua karena orang tua ingin cepat menimang cucu dan ada perasaan takut anaknya dikatakan gadis tua atau tidak laku. Dan kebanyakan perkawinan di bawah umur dilakukan oleh kaum wanita dari pada laki-laki. Hal ini karena umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia akan kembali kedapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada laki-laki.

B. Dampak Perkawinan Di Usia Dini

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.⁵

⁵YusufPernikahanDini “<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam> Fatiwie, - kontemporer/ 1240-pernikahan-dini-dalam-perspektif –agama-negara (28 Maret 2013).

Dalam hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Syeh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar

jalur nasab tetap terjaga dalam pandangan hukum Islam, hubungan seks yang mendapatkan legilitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Sekarang ini banyak remaja melakukan pernikahan di bawah umur, semestinya para remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah diusia dini. Karena pada umumnya remaja yang menikah di usia dini tidak dapat menikmati bangku sekolah. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan.

Selanjutnya dampak pernikahan dini utamanua dirasakan oleh anak perempuan. Bila perkembangan alat vitalnya belum sempurna dan dipaksakan untuk melakukan senggama, tidak jarang terjadi perobekan, begitupun pada saat melahirkan kesulitan persalinan pada ibu-ibu muda ini, dapat dimulai sejak kehamilan. Keracunan hamil, umumnya terjadi pada mereka yang hamil sebelum 17 tahun ataupun mereka diatas usia 35 tahun. Mereka secara tidak

sadar hendaknya diawasi oleh dokter ahli persalinan dan kandungan (Osgn), apabila mereka hamil di usia dini pada keadaan seperti ini perobekan jalan lahir akan terjadi bila perawatan selanjutnya tidak sempurna, berbagai dampak merugikan, mulai pendarahan, infeksi dan bahkan tidak mustahil timbulnya jaringan kanker dapat terjadi kemudian. Dari aspek kesehatan wanita yang telah menikah dan hamil sebelum usia 17 tahun resiko kehamilan dalam bentuk keracunan kehamilan (eklampsia) sangat mungkin dihadapinya.

Kekurangan ini tidak luput dari berbagai unsur yang pada dasarnya, unsur tubuh ibu mudah masih memerlukan pedewasaan. Perkembangan alat-alat vital yang mendukung kehamilan dan kelahiran, diusia kurang dari 17 tahun ini sesungguhnya jauh dari memadai. Serta banyak hal yang menyebabkan terjadinya berbagai komlikasi diantaranya, jika ibu terlalu muda yaitu usia kurang 20 tahun, secara fisik dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Secara mental ibu belum siap menghadapi segala perubahan pada kehamilan dimana dalam usia kurang dari 20 tahun ibu takut terjadi perubahan pada postur tubuhnya atau takut gemuk, sehingga cenderung mengurangi makan sehingga asupan gizi termasuk asupan zat besi kurang yang berakibat biasa terjadi anemia.

Menurut Drs. Eb. Subakti dalam bukunya, “Sudah siapkah menikah,” menjelaskan bahwa salah satu faktor pemicu terbesar perceraian adalah pernikahan dini. Karena bagaimanapun, pernikahan usia muda mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung

jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Juga di sampaikan oleh M.Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “ Indahnya Pernikahan Dini” mengemukakan bahwa menyegerakan pernikahan merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesah-gesah dalam menikah dapat mendatangkan keburukan. Jika ini terjadi, orang bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang pernikahan dini. Padahal penyebab utamanya bukanlah pernikahan itu, melainkan langkah kita yang tergesah-gesah saat menikah. Bagi mereka yang melakukan pernikahan diusia dini, dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga, belum mampu mengendalikan rumah tangga mereka baik kebutuhan ekonomi maupun kemampuan mendidik anak-anak. Kematangan untuk melakukan perkawinan tidak dapat di lihat dari sisi kemampuan dan kesempurnaan biologis/fisik, akan tetapi harus juga kita melihat dari sisi kematangan jiwa seseorang, apabila ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan berkenaan adanya berbagai faktor berpengaruh dalam rangka pelaksanaan perkawinan di bawah umur, diharapkan agar segenap aparat penegak hukum termasuk para Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu (PPN) dapat menjadi aparatur negara yang berkualitas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setidak-tidaknya para atasan, pejabat dan petugas pencatat nikah dalam melaksanakan tugasnya, dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat penegak hukum, sikap yang lugas dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir,

penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat, memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru di buat.

Semua hal tersebut di atas tentunya dimulai dengan rasa tanggung jawab diri, menjadi tanggung jawab bersama, bahwa hal yang besar tentu di mulai dari hal yang kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan dan efektivitasnya tindakan pemerintah mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah tangan harus dipertautkan dengan sub sistem yang lain. Hal ini penting, karena setiap sistem dan sub sistem dapat saling pengaruh mempengaruhi. Efektif dan tidak Efektifnya penegakan hukum perkawinan bukanlah persoalan retorika, karena baik secara teoritik maupun secara empirik tidak dapat disangkal kemungkinan adanya berbagai faktor yang berpengaruh. Misalnya perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan alat komunikasi atau biasa di sebut Hp dan Televisi dengan acara-acara yang dapat merusak pikiran anak muda.

Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus ke dunia sesat, mulai berhubungan dengan minuman-minuman keras dan kawin lari, sehingga orang tua khawatir atas keselamatan anaknya dari pergaulan bebas.

Sebagaimana di katakan Ahmad Rafiq, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang di tentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu

terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.⁶

Namun karena pertimbangan maslahat umat, akhirnya diatur dalam Undang-Undang tentang batas usia minimal seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Bahkan didalam hadis terdapat ajaran bagi para pemuda untuk melakukan perkawinan bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Rasulullah SAW bersabda; yang artinya: “ Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian telah mampu nikah, hendaklah dia menikah karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menahan syahwat dari dosa.”

Hadis di atas menerangkan bahwa siapa saja yang merasa sudah siap menikah dan mampu berumah tangga maka menikahlah, karena dengan menikah bisa mengurangi kesyahwatan dan menjaga kesehatan pada kemaluan namun bila tidak mampu maka di anjurkan untuk berpuasa. Sedangkan Al-Qurtuby berkata : “ Orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan takut terjerumus dalam maksiat jika tidak menikah, maka ia wajib menikah. Dalam hal ini di jelaskan bahwa tidak halal menikah bagi orang yang merasa tidak mampu menafkahi istrinya. Maka Al-Qurtuby menganjurkan supaya seluruh ummat Islam, muda maupun tua yang mampu membelanjai keluarga agar menikah menyatakan bahwa

⁶ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h.78 menikah adalah sunnah nabi.

Beliau juga mengatakan bahwa hidup membujang tidak di benarkan dalam agama Islam, karena membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar hidup kemanusiaan.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, baik dalam pasal-pasal perundang-undangan maupun dalam Al-Qur'an serta dalam Hadis, penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan dini atau di bawah umur tidak di tentukan dalam ayat atau hadis secara tekstual mencegahnya, akan tetapi dari pendapat para ahli fikih menghubungkan permasalahan ini dalam S.An-Nisa ayat 4 yang didalamnya ada isyarat pada pernikahan dini. Sedangkan para ulama fikih menyusun KHI membatasi usia perkawinan yang penting bagi kemaslahatan umat.

C. Pandangan Secara Biologis dan Psikologis .

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga didalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh sebab itu manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri. Hal ini di harapkan agar manusia di dalam berbuat tidak mengikuti hawa nafsunya saja. Dan selain itu sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

⁷Tenku Muhammad hasbi As-Shidiqy, Mutiara Hadis 5 (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 6

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para Ulama adalah sebagai berikut : Para Ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan mukallaf atau baligh) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan).⁸ Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seseorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fukaha sepakat menjadukan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa.

Selanjutnya secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian di pandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi, dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan kedua belah pihak sudah matang jiwa dan raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu : (kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut di mungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan.⁸ Akan tetapi perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi

⁸Muhammad Ali Assayis, Tafsir Ayat Al-Ahkam Al-Qur' an(Terjemahan Muhammad Ali Sabiq, 1983), h. 212.

kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi, perkawinan merupakan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya .

Maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang di sebutkan diatas , dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Akan tetapi berdasarkan Ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan di pengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah di mana dia berada, sehingga ada perbedaan percepatan lambatnya kedewasaan. Karena perkawinan di usia muda sering juga menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, ini di sebabkan karena kurang kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian.

a. Pandangan Secara Psikologis

Sebelum di jelaskan mengenai dampak perkawinan dini ditinjau dari psikologis, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian psikologis.

Menurut arti kata , maka psikologi sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa, yakni dari kata “Pysche “ yang berarti jiwa, roh dan logos yang berarti ilmu.⁹

Dengan demikian, apabila dua akar kata tersebut dipadukan akan berarti psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, Roh. Namun demikian pengertian psikologi tidak hanya terbatas pada ilmu yang mempelajari jiwa atau roh, melainkan ilmu yang ingin mempelajari manusia sebagai satu kesatuan yang bulat antara jasmani dan rohani. Secara psikologis, menikah pada usia muda/ dini merupakan suatu beban psikis karena berumah tangga dan menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, memerlukan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Oleh karena itulah mengapa ada batasan usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan, Salah satunya disebabkan diperlukannya kesiapan mental seorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul ketika mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁰. Dari segi psikologis, sosiologi maupun hukum Islam perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori yaitu Pertama “ Perkawinan di bawah Umur asli yaitu perkawinan di bawah umur benar murni di laksanakan oleh kedua mempelai.

⁹ M.Ngalim Perwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), h. 1.

¹⁰ Saliw ati, “pernikahan Dini dan Permasalahannya ,” [http:// www.scribd.com/doc/704-79513/ Pernikahan Dini](http://www.scribd.com/doc/704-79513/Pernikahan-Dini) (2 April 2013)

Sedangkan yang kedua: “ Perkawinan di bawah umur palsu yaitu perkawinan di bawah umur yang hakekatnya dilakukan sebagai kejahatan perilaku kedua mempelai , perkawinan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai

Hal ini berarti, antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan yang mulia dengan maksud menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat tidak dapat mencium “ bau busuk “ yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya.¹¹

Arti perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri “. Dalam perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriyah saja, dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali lepas. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan goliidhan* untuk mentaati perintah Allah swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu

¹¹Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi* (Bandung; Mujahid Press, 2002), h. 20.

¹²Himpunan Undang-Undang RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Trinity,t,th), h. 431.

akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah swt.¹³ Sebagai contoh masalah mulai timbul ketika mereka merasa masih muda sehingga kehidupan remaja yang penuh dengan kegembiraan dan hura-hura masih

terbawa dengan ingin dilakukan, seperti jalan-jalan, pergi keluar sampai malam, dan lain-lain. Jika masyarakat sekitar tidak dapat memahami dan mentolerir perilaku mereka, maka akhirnya akan menimbulkan masalah juga. Oleh karena itu meskipun mereka sudah berkeluarga, peran orang tua masih diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perkembangan jiwa seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya faktor lingkungan. Faktor yang paling besar pengaruhnya adalah perkembangan fisik atau perkembangan usia, makin meningkat usia seseorang makin terkontrol tingkat dan perbuatannya. Semua kegiatan dapat dilakukan dengan pertimbangan yang matang, setelah ia berumur 20 tahun atau 21 tahun dalam tahap ini disebut dengan masa kesempurnaan remaja atau masa dewasa. Oleh karena itu, wajarlah kiranya jika undang-undang perkawinan menetapkan usia minimal kawin pada usia 16 tahun dan 19 tahun untuk pria dan wanita yang menikah di bawah usia tersebut mereka dapat meminta izin dari pengadilan, dan bagi mereka yang berusia dibawah 21 tahun cukup mendapat izin dari orang tua mereka hal ini dikuatkan dalam KHI pasal 15 ayat 2.

13 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000),h.14.

B A B IV

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A . Perkawinan Menurut Syari'at Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al-Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitasi agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.¹

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan. Secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur . Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang di luncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak

¹ Ibrahim, Al-Bajuri (Semarang : Toha Putra, 2002), h. 90.

dianggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.²

Di Indonesia terutama didaerah-daerah pedesaan, masih banyak terdapat perkawinan dibawah umur, kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang mentradisi hingga sekarang.

Ukuran perkawinan dimasyarakat seperti itu adalah kematangan fisik belaka (haid, bentuk tubuh yang sudah menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder) atau bahkan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan calon pengantin misalnya: panen, utang piutang antara orang tua dan sebagainya. Tidak mengherankan jika di beberapa tempat di Indonesia masih terjadi anak-anak berumur 9 – 13 tahun sudah menikah.

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami istri, dengan syarat –syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³ Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dalam Al-Qur'an, yaitu S. An-Nisa ayat 6.

² Ibnu Hajar Al- Asqalani, Fatul bari (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999), h.237.

³ Andi Syamsu Alam, Op, cit, h.57

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦١﴾

Terjemahannya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴

Selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 32 tentang perintah mengawini orang yang sendirian dan layak di kawini.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan . (Jakarta; CV.ATLAS. 2000), h. 549

Terjemahnya:

Dan kawinilah orang –orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian –Nya) Lagi Maha Mengetahui.⁵

Dalam tafsir al-misbah, makna kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maragi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya. Sedang yang dimaksud *balighul al-nikdh* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya al-Maragi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh di bebani persoalan –persoalan tertentu.

Berdasarkan penafsiran kedua ayat tersebut diatas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, akan tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan, seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum *rushdan*

⁵ Ibid.

dalam tindakannya. Hal ini dapat di buktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan pada dasarnya dapat di tentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.⁶

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa pendapat berikut ini. Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut , menurut sebahagian fuqaha bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Shafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.⁷

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi Hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober

⁶ Dedy Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung, Al- Fikriis, 2009), h. 23.

⁷ Dedy Supriyadin dan Mustopa, Op.cit., 24.

1975 dengan Peraturan Pelaksana naannya PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 menamakan Undang-Undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak di atur hukumnya dalam agama atau kepercayaan , karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntunan zaman .

Berbeda dengan negara sekuler, Perkawinan menurut UUP di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataan saja akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan di gantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) UUP.⁸

Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan UUP dapat disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat di ferensiasi ini tidak dapat dielakkan karena negara Indonesia memiliki 5 agama

⁸ Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 4.

yang dilindungi oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi yang beragama Islam diatur tersendiri dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

KHI terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam di Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang di namakan KHI sebagai hukum material yang di pegunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya KHI ini diharapkan akan meningkatkan peranan dari Hakim Agama dalam ber-ijtihad.

Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat sendiri dalam melihat persoalan yang timbul dalam di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tentang perkawinan diatur dalam buku KHI, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Perkawinan merupakan peristiwa besar sehingga sebelum memulainya harus mempersiapkan diri, fisik, mental, dan materi, dan harus dicermati pula bahwa dalam pernikahan dibutuhkan kejujuran dan kebenaran serta persiapan yang matang sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan harapan kebahagiaan dan rahmat Allah SWT. Perkawinan yang dilakukan tidak dengan pertimbangan yang matang akan banyak menemui berbagai tantangan dan rintangan, oleh karena itu untuk menuju suatu pernikahan yang baik diperlukan berbagai persiapan baik mental maupun materi sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di ridoi oleh Allah SWT.

Dalam konsep ajaran agama Islam pelaksanaan pernikahan hanya mengisyaratkan tiga hal pokok yaitu : akad nikah dan segala persyaratannya, do'a serta resepsi yang sangat sederhana.

B. Perkawinan Menurut Peraturan Negara Dan Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan seorang calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lainnya menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁹

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan me ngikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan cita-cita keluarga tersebut perkawinan tidak lengkap jika hanya bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan itu berkaitan pula dengan hukum suatu negara, perkawinan baru di katakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹⁰

⁹ Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. (Bandung: Personal Press, 2007), h. 290.

¹¹ Undang-Undang No 1 tahun 1979 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2.

¹² Sayyib Sabiq, Fiqih Syari'ah (terjemahan) M. Thalib (Bandung : Alma'arif, 1998) h.. 86.

agama dan administrasi pemerintahan. Islam menentukan 5 syarat untuk pernikahan yang sah yaitu: adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, wali, saksi, mahar, dan mahar (mas kawin)¹²

Menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1979 ayat 1 tentang perkawinan, disitu disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan pada ayat 2 tertulis tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹. Ini berarti bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilaksanakan dengan aturan. Sedangkan perkawinan menurut hukum negara nanti di akui perkawinan itu sah setelah dicatat pelaksanaan perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN).

Administrasi perkawinan ditangani oleh kementerian agama yaitu bagian pencatat nikah yang bertugas di kantor Urusan agama (KUA) yang di dirikan oleh kementerian agama di daerah-daerah, pada umumnya pencatatan nikah tidak di lakukan oleh pegawai pencatat nikah, tapi dilakukan oleh Imam Desa yang berstatus pelaksana tugas PPN, kemudian imam melaporkan perkawinan yang telah di catat ke KUA.

Biaya pencatatan nikah telah di tentukan yaitu sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dalam peraturan No 97 tahun 2009 yaitu akad nikah dapat dilaksanakan dikantor KUA, namun masyarakat lebih banyak memilih menikah dirumah masing-masing ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah membudaya pada masyarakat walaupun hanya pesta dilaksanakan apa adanya,

namun sebahagian juga masyarakat melaksanakan dengan meriah sesuai dengan kemampuan keluarga .

Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan upacara ibadah ritual belaka, akan tetapi ajaran Islam mengandung dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dengan berpodoman kepada dua prinsip yaitu *Hablun Minallah* dan *Hablun Minannas*, yaitu menjaga hubungan pertikal kepada Allah SWT dan memperbaiki hubungan secara horisontal terhadap sesama manusia. Disampin itu Islam juga memerintahkan agar manusia senantiasa berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, menuntun setiap pribadi supaya memiliki sifat sabar, pemaaf, jujur, benar, adil, tinggi cita-cita, menghormati orang tua dan berbuat baik kepada keduanya serta kepada sesama manusia. Demikianlah ajaran Islam dalam membentuk suatu rumah tangga muslim menjadi rumah tangga dan keluarga sakinah, penuh dengan ketenangan dan ketenteraman, tidak mudah retak dan tidak mudah terganggu. Oleh karena itu alangkah idealnya jika semua manusia melaksanakan ajaran islam tentang pembinaan karakter dalam keluarga, sehingga dapat menciptakan keluarga sakinah yang diridhoi oleh Allah SWT. Tujuan pokok dari pada perkawinan itu adalah menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah. Sebagaimana dikatakan prof. Dr.H.Mahmud Yunus.dalam bukunya *Hukum Perkawinan dalam islam* bahwa “Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh tuntunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.”¹³

Keluarga sejahterah atau keluarga sakinah adalah merupakan dambaan dan idaman bagi setiap keluarga muslim, dan tujuan daripada keluarga sakinah

tersebut adalah menciptakan dan membentuk keluarga sejahtera dan masyarakat sejahtera, oleh karena jika setiap keluarga dalam suatu masyarakat telah mendapatkan ketenteraman dan kedamaian maka tentunya tercipta pulalah ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut tidak dapat diingkari oleh karena masyarakat secara luas, bahkan sampai kepada satu negara adalah merupakan himpunan dari pada beberapa keluarga, dan jika keluarga-keluarga dalam masyarakat dan negara itu telah mendapatkan kesejahteraan, maka tentunya kesejahteraan masyarakat dan negara akan terwujud, dan dengan sendirinya akan terciptalah suatu negara yang aman dan damai. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah Saba' ayat 15 yang berbunyi :

¹³ Lihat Prof.Dr.H.Mahmud Yunus. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Cet. VIII. (Jakarta : PT.Hidakarya Agung 1979), h. 1.

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Terjemahannya:

... (Negerimu) negeri yang baik dan (Tuhanmu) Yang Maha Pengampun.¹⁴

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Islam pun memandang rumah tangga bukanlah sekedar soal perorangan. Bahkan disamping soal perorangan, rumah tangga dipandang merupakan soal masyarakat dan negara.¹⁵

Oleh karena itu istilah Baldatun Thoyibatun Warabbun ghafur (masyarakat yang adil dan makmur yang senantiasa mendapat ridha dan ampunan dari Allah SWT), akan terciptalah melalui keluarga-keluarga sakinah daripada suatu masyarakat.

C. Asa Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan

Perkawinan merupakan ibadah yang telah disyariatkan dalam agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya diikat oleh sebuah aturan dan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :

¹⁵ Sukanto Nuri. Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam , (Subaya. Al-Ikhlās. 1981), h. 18

1. Perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara kandung
2. Adanya para saksi dalam perkawinan
3. Adanya ijab kabul.¹⁶

Hubungan yang terjadi antara sesama manusia merupakan interaksi sosial manusia sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjadi karena saling mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dari fungsinya masing-masing. Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak masing-masing. Sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh etika dan moralitas yang benar.¹⁷ Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia, ada yang diatur oleh ajaran agama yang diyakini segenap umat manusia sebagai sumber aturan yang tertinggi yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa, ada pula yang diatur oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan telah menjadi norma sosial.

Di samping itu, perilaku manusia diatur oleh hukum formal sebagai undang-undang atau peraturan yang positif yang dijadikan landasan struktural

dalam hukum masyarakat berbangsa dan bernegara dengan institusi hukum yang

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang. (Bandung, Personal Press, 2007) ,h. 290

disahkan oleh peraturan tertentu dalam suatu hukum bersangkutan. Apapun bentuk hukum yang berlaku, baik yang formil maupun yang normal secara substansial, hukum tersebut bersifat mengatur, mengikat, memberi sanksi, dan memaksa manusia sebagai objek hukum agar berperilaku dengan mentaati hukum bersangkutan. Sebaliknya, manusia pun sebagai subjek hukum yang menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian hukum secara normatif mempunyai ciri-ciri khusus yaitu hendak melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum . Sesuai dengan tujuan yaitu untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Kedudukan manusia yang di lindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan ke pemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal, dirinya tidak merugi. Sebagai mana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat kepada hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, dan hubungan anak. ¹⁸

¹⁷ Abdoel Jamal, Pengaturan Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),h.1

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, op-cit, h. 292

Berkaitan dengan masalah perkawinan, hukum perkawinan dapat menjadi wajib, apabila kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi, dan mentalitas lainnya. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, ia akan berdosa sebab nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi. Kecuali apabila seseorang telah mampu secara lahiriyah dan batiniyah, tetapi ia masih mampu menahan hawa nafsu seksualnya, maka menikah baginya hukumnya sunnah.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriyah atau batiniah, maka menikah baginya haram. Ia tidak dibenarkan menikah karena akan membahayakan hidup berumah tangga. Demikian pula halnya yang hanya mengandalkan nafsu seksualnya, tetapi secara materi dan ekonomi masih nol maka pernikahannya adalah makruh.¹⁹

Dari uraian tersebut dapat di pahami bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah dalam syari'at agama islam yang memerlukan kesiapan mental spritual, serta kesiapan lahir dan bathin. Dengan memahami hal tersebut di atas, maka asas-asas yang hendak dibangun dalam perkawinan adalah :

- 1 . Asas persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan;

2 . Asas kehidupan yang seimbang antara hak dan kewajiban suami istri;

¹⁹ Sayyib Sabiq, Fiqih Syari'ah Terjemahan M. Thalib (Bandung:Alma'arif, 1998),h.22-23

4 . asas regeneratif, yakni memperbaharui keturunan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam, yakni memelihara keturunan (hifzh an-nasl)²⁰. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya :

Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan dari pada (Adam) itu pasangannya (istrinya yaitu hawa) dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut –nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu .²¹

Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (1). Perkawinan menurut hukum Islam adalah :
”pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghali dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti terdapat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum

²⁰ Sayyib Sabiq, op-cit, h. 24

²¹ Departemen Agama RI, op-cit, h. 77

Islam. Perkawinan yang sah menurut pasal 4, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
(2) Kewajiban Pencatat Perkawinan .

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan sebagai berikut :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan Perkawinan tersebut, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatat pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

(3) Perkawinan Menurut UU No . 1 Tahun 1974.

Untuk menjelaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan surat keputusan menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, dan saling mengisi suami dapat membimbing istri secara arif dan bijaksana dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang di hadapinya. Dalam Al-Qur'an di gambarkan bahwa suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya sebagai pakai an bagi suaminya, yang berarti keduanya saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain, Berdasarkan penjelasan di atas, baik dalam pasal-pasal perundang-undangan

maupun dalam Al-Qur'an serta dalam hadist, penulis berkesimpulan bahwa pernikahan dini tidak ditentukan ayat atau hadist secara tekstual mencegahnya, akan tetapi dari pendapat para ahli fikih menghubungkan permasalahan ini dengan ayat 4 Surah An-Nisa yang di dalamnya ada isyarat pada pernikahan dini. Sedangkan para ulama fiqih menyusun KHI (Kompilasi Hukum Islam) membatasi usia perkawinan yang penting bagi kemaslahatan umat.

Perkawinan atau pernikahan adalah melalui lembaga, baik itu seorang laki-laki dan perempuan berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk satu unit kemanusiaan. Perkawinan atau pernikahan, merupakan akar yang bercabang menjadi apa yang dikenal dengan hubungan darah seperti ibu, bapak dan saudara dan kemudian lingkaran hubungan darahnya semakin luas, yang dalam Islam disebut hubungan rahim. Dalam Islam pernikahan hukumnya wajib bagi siapa yang mampu melakukannya.

Memang pernikahan dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada Nabi Muhammad saw. Menikah merupakan sunnah yang disyariatkan Allah kepada Rasul –rasulnya. Sehingga apabila seorang muslim hendak kawin dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, di perbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah kejenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang, dan supaya dia tidak tertipu. Sehingga dia akan selamat dari berbuat salah dan tidak jatuh ke dalam sesuatu yang tidak di inginkan.

Ada dua faktor utama pernikahan dalam Islam yaitu : pertama, adalah persatuan antara dua pihak yang saling berhasrat satu sama lainnya, dan secara

spiritual tertarik melalui pilihan babas satu sama lain, serta secara fisik karena dorongan seksual yang mencari penyaluran yang halal. “ Kedua : yaitu, untuk pelestarian spesies manusia dengan jalan produksi. Kedua fungsi tersebut sangat penting, dan ikatan perkawinan dengan penetapan persyaratan, tidak ada hubungan seks atau tidak ada kehamilan adalah tercelah menurut ajaran Islam .

Perkawinan menyelamatkan masyarakat dari ancaman dekadensi moral. Disamping itu dengan perkawinanlah masyarakat akan mampu mengamankan diri dari kejahatan sosial, karena tabiat manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan perkawinan dan ikatan yang halal. Dengan perkawinan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang di timbulkan dari perzinaan atau prostetusi dan bentuk-bentuk seks yang amoral. Dengan melalui jalan perkawinan akan timbul kerja sama antara suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pendidikan anak dan beban-beban kehidupan akan ditangani oleh suami istri dengan saling bekerja sama. Dalam hal ini cinta yang tumbuh dalam perkawinan adalah lebih kuat lebih agung karena tuhan menciptakannya untuk menjalin perkawinan itu menjadi kekal, tidak gampang diputuskan . Itulah yang dapat menumbuhkan rasa bahagia, menumbuhkan keluarga sakinah dan menimbulkan kesetiaan yang tahan uji, yang tidak mudah ditembus oleh godaan dan rayuan siapapun.²²

Demikianlah hikmah kasih sayang yang diciptakan oleh Tuhan, yang mendasari cinta birah dalam perkawinan. Perlu dirawat dan dipupuk agar berurat-berakar dengan kuat dalam jiwa kedua insan, yakni suami dan istri. Dengan

²²Akilah Mahmud, Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam, (Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan. Alauddin University Press, 2012),h. 109 -110.

demikian pendidikan seks dalam islam dititik beratkan untuk mempersiapkan diri dalam menempuh hubungan seksual yang sah, yang diikat oleh tali pernikahan guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahterah atau keluarga sakinah. Di dalam ajaran islam (Qur'an dan Sunnah) banyak terdapat petunjuk tentang masalah seks pada manusia, maka petunjuk agama tersebut perlu dipahami hingga dapat menjadi alat pengendali diri pada perilaku seksual.

Syariat Islam telah menjadikan orang tua (ibu bapak) bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya tanpa membedakan apakah itu hanya tanggung jawab ibu, atau hanya tanggung jawab bapak saja. Tetapi keduanya mempunyai peran yang sama- sama harus dilaksanakan sebab anak adalah titipan yang dipercayakan Tuhan untuk dididik dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak . Manusia adalah makhluk yang harus dididik, karena dengan demikian ia menjadi manusia , Allah swt menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, karena orang tua adalah orang pertama yang di kenal oleh seorang anak dan merupakan seorang pemimpin maka mereka berdua harus bertanggung jawab atas yang di pimpin nya, satu cara ialah dengan mendidik mereka sejak usia dini.

Pembentukan keluarga tidak akan terjadi tanpa melalui pernikahan. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membangun keluarga muslim. Islam

juga menganjurkan ummatnya melakukan pernikahan, karena pernikahan adalah merupakan sarana terhormat untuk mendapatkan anak shaleh. Di samping tujuan-tujuan yang lain, Keluarga adalah amanah ilahi yang harus dipelihara dan di bina dengan baik, sebagai tiang kehidupan masyarakat dan bangsa dalam menyiapkan generasi penerus.

Karena itu agama Islam sangat menitik beratkan kepada mutu suatu keluarga. Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat . Dalam sebuah negara keluarga itu ibarat bibit tanaman, jika bibit tanaman itu baik dan sehat, maka akan tumbuh suatu pohon yang berdaun rindang dan berbuah banyak. Atau dengan kata lain keluarga bagi Negara merupakan inti semisal bibit dari pohon. Jika bibit itu sehat dan terpelihara dengan baik , akan tumbuh pohon kuat dan sehat serta berbuah lezat.

Keluarga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara . Jikalau kita ingin keberhasilan pembangunan bangsa dapat tercapai maka kita harus memulainya dari keluarga. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Islam tidaklah memandang perkawinan itu adalah sesuatu yang hanya melibatkan suami dan istri berlaku, namun juga menganggap perkawinan sebagai suatu lembaga atau institusi yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap struktur seluruh bangsa, oleh karena perkawinan merupakan inti dari pada keluarga , sedangkan keluarga inti dari pada kehidupan suatu masyarakat.

Kemudian untuk menjaga dan memelihara suatu keluarga agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain agar suatu keluarga tidak mudah rusak maka tentunya individu-individu yang terlibat dalam suatu keluarga itu

mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunai kan, bahkan Islam memandang bahwa kewajiban-kewajiban dalam keluarga itu adalah wajib dilaksanakan, dan kewajiban tersebut akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian agama Islam diperuntukkan untuk hidup dan bukanlah agama untuk mati yang hanya mengurus persoalan spritual semata sedangkan persoalan mu'amalah diabaikan . Banyak orang salah faham dan salah perhitungan dalam melihat hal tersebut.²³ Konteks masalaahnya adalah bahwa peranan aqidah islam didalam masyarakat sangat menentukan corak dan gaya hidup masyarakat itu sendiri selalu berada dan terus mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dengan sempurna. Dengan kata lain aqidah Islam sangat urgen dalam menghadapi komunitas masyarakat dn sebagai pedoman dalam menciptakan suatu keadaan masyarakat sehingga dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangann-Nya.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut , manusia pada saat sekarang ini diperhadapkan pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang serba kompleks sebagai akibat dari semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang pada gilirannya nilai-nilai yang ada tidak terlalu diperhatikan begitu pula luntturnya sifat solidaritas. Olehnya itu penyebaran nilai-nilai ajaran

²³ Disadur dari H. Efendi Zarkasi, Islam Agama Untuk Hidup, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 9.

Islam harus menorehkan kebatasan-batasan geografis dengan segala keunikannya, juga harus menembus lapisan-lapisan kultural yang beraneka ragam.

DR. H. Umar Syihab mengemukakan bahwa, dalam rangka mengantisipasi perubahan sosial nilai-nilai aqidah Islam tidak lantas harus berubah atau diperbaharui tetapi pranata dan struktur dalam rangka mewujudkan ajaran-ajaran Nya mengalami perubahan. Perubahan sosial yang semakin drastis, terutama akumulasi prestasi yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi menambah kompleks persoalan terutama dalam memasuki era baru yang betul-betul dapat merobah konsep-konsep yang sudah mapan, misalnya, konsep tentang ibu, bapak, anak, penyusuan dan kehamilan dan sebagainya. Untuk menjawab tantangan tersebut di atas ada dua alternatif yang dikemukakan :

Rasa keagamaan di ungkapkan ke dalam bentuk kegiatan populer yang sifatnya kontemporer.

1. Dengan tetap tenggelam dalam rangkuman agama.²⁴

Dengan demikian masyarakat akan semakin kuat berpegang kepada tradisi-tradisi keagamaan yang agaknya mulai goyah atau paling tidak mempertahankan status quo tradisi keagamaan masyarakat tersebut. Al-Qur'an yang berisi petunjuk bagi umat manusia baik dalam rangka perumusalam sistem-sistem sosial kemasyarakatan maupun dalam mengantisipasi dampak negatif dari suatu sistem, senantiasa membuka diri dalam melakukan dialog kultur, kapan dan dimanapun juga.

Sehingga dapat dipahami bahwa Al-Qur'an bukan barang antik yang harus di sakralkan, akan tetapi Al-Qur'an dan secara kultural dapat dihayati, dan secara sosiologi ajaran-ajarannya dapat diamalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidaklah memandang perkawinan itu adalah sesuatu yang hanya melibatkan suami dan istri berlaku, namun juga menganggap perkawinan sebagai suatu lembaga atau institusi yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap struktur seluruh bangsa, oleh karena itu perkawinan merupakan inti dari pada keluarga, Sedangkan keluarga adalah inti dari pada kehidupan suatu masyarakat. Kemudian untuk menjaga dan memelihara suatu keluarga agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain agar suatu keluarga tidak rusak maka tentunya individu-individu yang terlibat dalam suatu keluarga itu mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikan, bahkan Islam memandang bahwa kewajiban-kewajiban dalam keluarga itu adalah wajib di laksanakan, dan kewajiban tersebut akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Adapun kewajiban-kewajiban dalam keluarga ini dapat di bagi pada lima bahagian yaitu :

1 . Kewajiban seorang suami terhadap istrinya ;

²⁴ DR.H.Umar Syihab. Al-Qur'an Dan Rekayasa Sosial. (Cet. I;Jakarta: Pustaka Kartini 1990),h. 10.

- 2 . Kewajiban seorang istri terhadap suaminya;
- 3 . Kewajiban orang tua terhadap anaknya;
- 4 . Kewajiban anak terhadap orang tuanya;
- 5 . Kewajiban yang terpikul kepada semua anggota keluarga terutama suami dan istri.²⁵

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban keluarga ini Abu Bakar Muhammad menegaskan bahwa : hak dan kewajiban suami dan istri itu, bersifat timbal balik, artinya segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami, adalah menjadi hak bagi istri, dan sebaliknya segala sesuatu yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Oleh sebab itu seorang suami selalu menaruh perhatian terhadap istrinya dengan menjaga kehormatannya, serta menjaga nama baik istri dan keluarganya suatu hal yang tidak boleh dilupakan bagi seorang suami.

²⁵ Akilah mahmud, Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam, (Cet.I, Alauddin University, Press. 2012), h. 46-47.

B A B V

P E N U T U P

A . *Kesimpulan*

Dari uraian tersebut di atas setelah penulis menguraikan dari bab satu sampai dengan bab terakhir, yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Adat maka penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

- 1 . Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu karena faktor Adat dan budaya, faktor ekonomi. Faktor agama, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan yang terakhir adalah karena faktor atas kemauan anak itu sendiri.
- 2 . Perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang akan menjadi suami istri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum Adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.
- 3 . Adapun dampak yang di timbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negatif terhadap kedua belah pihak mempelai seperti dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga adanya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur .

B . *Saran – Saran*

Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas beberapa kesimpulan, maka dipandang perlu di ajukan saran –saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka mene kan terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan di bawah tangan dalam masyarakat sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah , mawaddah, dan warahmah.
- 2 . Pemerintah yang berwewenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh Agama dan masyarakat tentang dampak negatif dan positif perkawinan di bawah umur, dan tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan yang menyangkut hukum Adat setempat terutama pasal 7 ayat (1) yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan dalam lingkungan keluarga.
- 3 . Agar masyarakat luas mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur , serta perlu dianalisis lebih lanjut dengan berpijak dari suatu kerangka konseptual, dan tetap mengacu pada norma atau kaidah hukum yang termuat dalam UU. Nomor (1) Tahun 1974 dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4 . Agar para penegak Hukum selalu memperhatikan dengan sebaik-baiknya dalam melaksana kan tugas dan tanggung jawabnya pada masalah perkawinan di bawah umur